

Dilema Ujian Nasional sebagai Standarisasi Kualitas Pendidikan

Ditulis oleh : Birgitta Devina Thasmyn (XII MIPA 1 / 2)

Pendidikan adalah kunci utama bagi kemajuan bangsa. Dalam pendidikan, siswa memiliki kewajiban untuk belajar. Hasil belajar tersebut nantinya akan diujikan dalam bentuk tes atau penilaian. Di Indonesia, sempat diberlakukan Ujian Nasional (UN) di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK untuk mengukur pencapaian siswa. Namun, menjadikan UN sebagai satu-satunya indikator dalam mengukur kemampuan siswa bukanlah hal yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, timbul perdebatan mengenai efektivitas dan relevansi UN terhadap kemajuan pendidikan Indonesia.

Indonesia telah melewati lebih dari 79 tahun masa kemerdekaan dan menerima kebijakan 37 orang menteri pendidikan yang berbeda. Istilah UN pertama kali diperkenalkan di tahun 1950-an oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Pendidikan dengan nama Ujian Penghabisan. Selama beberapa tahun, Ujian Penghabisan berganti nama menjadi Ujian Negara, EBTANAS, Ujian Akhir Nasional, Ujian Nasional, hingga UNBK. Awalnya, UN bertujuan sebagai instrumen asesmen yang membantu menilai pencapaian sebagian standar nasional pendidikan, bahkan sempat menjadi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, UN dianggap sebagai standar dari pendidikan sehingga siswa dituntut agar bisa lulus dengan nilai yang bagus.

Setiap siswa memiliki keunggulan di bidang masing-masing dan tidak dapat disamakan dengan siswa lainnya. Pendidikan seharusnya berfokus pada pengembangan potensi siswa secara maksimal, bukan justru memaksakan kemampuan siswa untuk memenuhi standar yang ada. UN hanya mengujikan pelajaran tertentu. Padahal, kemampuan tiap siswa di bidang yang diujikan tidak bisa disamaratakan. Siswa yang berbakat di bidang nonakademis diharuskan mampu di bidang akademis, mengakibatkan kemampuannya di bidang nonakademis tidak tersalurkan secara maksimal.

Pelajaran yang diujikan pada UN, antara lain Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA atau pelajaran peminatan/kejuruan. Ujian ini hanya mengukur sebatas kemampuan teori yang bersifat hafalan. Metode seperti ini sudah bersifat kuno dan tidak realistis untuk diterapkan di abad ke-21, yang seharusnya mengutamakan

keterampilan, pemikiran kritis, dan pendidikan karakter. Berbicara tentang pendidikan bukan hanya mengenai belajar di kelas dan mendapat nilai, tetapi juga pendidikan karakter dan pengembangan *soft skill* sejak dini untuk menciptakan generasi yang dapat beradaptasi di tengah kemajuan zaman. Penerapan UN yang memprioritaskan pelajaran tertentu yang cenderung menghafal bukanlah instrumen yang tepat untuk mengukur pencapaian siswa.

Pada tahun 2017 silam, tersebar 17 kasus kebocoran soal dan kunci jawaban UN di wilayah Jawa dan Sumatera. Kejadian serupa juga terjadi di tahun 2015, bahkan lebih sistematis, yakni soal UN dibocorkan melalui media internet dan diduga terdapat campur tangan Percetakan Negara. Kasus ini bukanlah hal baru yang membuat pihak Dinas Pendidikan, sekolah, guru, maupun siswa untuk terkejut. Namun, jika kondisi ini telah sering terjadi, pelaksanaan UN perlu dipertanyakan faedahnya. Jika kita mengulik alasan dibalik bocornya soal tersebut, tampak adanya ketakutan dari pihak sekolah di daerah yang terpencil dan sulit mendapat akses pendidikan untuk dinilai buruk.

Dari segi biaya, UN membutuhkan dana tidak sedikit. Jika UN dilaksanakan tertulis, dibutuhkan kertas ujian, pensil, dan sebagainya. Sedangkan jika UN dilaksanakan menggunakan media komputer, ketersediaan komputer dan internet di setiap sekolah harus dipastikan terlebih dahulu. Menurut data Dapodik tahun 2020, Kemendikbud mencatat terdapat 8.522 sekolah belum memiliki aliran listrik dan 42.159 sekolah belum memiliki akses internet. Dana tersebut lebih baik digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, menaikkan gaji guru, maupun program beasiswa sebagai investasi untuk pendidikan masa depan dibandingkan untuk membiayai kegiatan yang diadakan setahun sekali.

Fungsi UN silih berganti, mengikuti pergantian menteri. Daya guna UN sebagai instrumen menjadi pertanyaan. Di saat yang sama, sekolah mengadakan Ujian Sekolah sebagai syarat kelulusan usai UN berganti fungsi (tidak lagi sebagai penentu kelulusan). Jika UN menjadi instrumen bagi siswa, mula-mula pelaksanaannya harus dipastikan terorganisir secara jujur. Namun, selama berpuluh-puluh tahun UN dilaksanakan, perkembangan pendidikan Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan usai UN dilaksanakan.

Penghapusan UN seolah keputusan yang tepat di tengah situasi pandemi sesuai keputusan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

Mulai tahun 2021 UN diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua asesmen baru ini berfokus pada literasi dan numerasi serta berfungsi sebagai pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Sejak Nadiem Makarim menjadi menteri pendidikan pada 2019-2024, diberlakukan pula P5. Kegiatan ini diutamakan mengembangkan keterampilan siswa, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan berpikir kreatif. Kebijakan baru ini awalnya menguntungkan siswa karena tidak lagi mendapat beban psikologis dari UN. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan baru dinilai memberikan efek tidak jauh berbeda dibandingkan UN.

Lantas, bagaimana Indonesia dapat menentukan acuan kemampuan siswa secara nasional? Indonesia perlu melakukan kilas balik, selama 79 tahun Indonesia menikmati kemerdekaan, sudahkah pendidikan menjadi prioritas utama? Bukan pendidikan berbasis nilai angka, melainkan pendidikan karakter dan moral. Siapa tahu, yang keliru sedari awal bukanlah kebijakannya, tetapi sistem dan pelakunya.

Prinsip pendidikan sebenarnya berpusat pada pengembangan kualitas siswa. Mula-mula, pola pikir masyarakat harus dibenahi. Masyarakat kita berpikir bahwa standar seorang siswa dikatakan pintar adalah jika mendapat nilai bagus di bidang Matematika. Selain itu, masyarakat terpaku pada glorifikasi terhadap julukan “anak pintar” dengan patokan nilai bagus. Padahal, setiap siswa memiliki bakat di bidang mereka masing-masing dan perlu dikembangkan dengan cara yang tepat.

Pemerintah perlu menetapkan standar baru untuk menilai kualitas pendidikan Indonesia. Dalam menilai kualitas pendidikan Indonesia, tidak cukup melihat nilai siswa, tetapi juga keterampilan berpikir siswa, kemampuan guru, kelengkapan fasilitas sekolah, dan pemerataan akses pendidikan berskala nasional. Pokok pelaksanaan berasal dari jiwa pelaksananya, yaitu kejujuran. Sebagus apapun perancangannya, hasil yang diharapkan tidak bisa didapat jika dilakukan secara tidak jujur.

Kunci utama pendidikan terletak pada peran guru. Bukan tanpa alasan kata “pendidik” disandingkan dengan kata “guru” dibanding kata “pengajar”. Guru memiliki tugas mendidik murid, baik menyampaikan materi pelajaran, mendidik etika, memberi motivasi, maupun menyampaikan evaluasi. Materi pelajaran yang disampaikan memiliki karakteristik beragam, berupa hafalan, hitungan, atau analisis. Maka dari itu, pelajaran perlu disampaikan dengan metode yang tidak mengharuskan siswa menghafal, melainkan memahami dan menerapkan secara konkret. Hal ini tidak hanya berlaku dari

segi materi, tetapi juga bisa diterapkan melalui penilaian, yakni penilaian yang berorientasi pada cara berpikir siswa dalam menganalisis.

Terakhir, sebelum pertimbangan diberlakukannya Ujian Nasional dipastikan, pemerataan pendidikan harus dilaksanakan terlebih dahulu. Pemerataan pendidikan seharusnya dilakukan terhadap bangunan sekolah, kelengkapan fasilitas, kemudahan akses pendidikan, termasuk internet, dan kemampuan guru. Dengan mempertimbangkan efektivitas, kejujuran, dan relevansi dalam sistem pendidikan abad ke-21, penghapusan UN adalah langkah yang tepat. Namun, perlu adanya instrumen lain yang lebih baik untuk menilai kualitas pendidikan secara nasional agar dapat selalu dievaluasi dan menghasilkan generasi yang bisa bersaing dengan perkembangan zaman.

Sumber

<https://www.kompas.com/edu/read/2025/01/19/090056571/ujian-nasional-un-dikembalikan-perluakah?page=all#page2>

<https://hai.grid.id/read/071670016/katanya-mahal-emang-berapa-sih-biaya-pelaksanaan-ujian-nasional>

<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7067491/dana-pendidikan-2024-rp-665-t-fokus-perluasan-wajib-belajar-bantuan-pendidikan>

<https://upskills.id/insights/sistem-pendidikan-di-indonesia/>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/14340001/mendikbud-nadiem-terbitkan-s-e-peniadaan-un-dan-ujian-kesetaraan-2021#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Menteri%20Pendidikan%20dan%20Kebudayaan%20Nadiem,tahun%202021%20dikarenakan%20penyebaran%20Covid-19%20yang%20semakin%20meningkat.>

<https://revoedu.org/peran-guru-dalam-pendidikan-tugas-tantangan-dan-solusi/>